

MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

(MODEL *SUPPORTING AGENCY* PEMERINTAH DESA BERSAMA KOMITE
SEKOLAH DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN)

¹Asrina M. Saman, ²Dr. Fitri Nur Mahmudah, M.Pd., ³Dr. Suyatno, M.Pd.I.

Email: 2108046057@webmail.uad.ac.id

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN, YOGYAKARTA

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu kepada kita semua sehingga model pembiayaan pendidikan “model *supporting agency* pemerintah desa bersama komite sekolah dalam mendukung pembiayaan pendidikan” dapat diselesaikan dari awal hingga akhir penyusunan. Model pembiayaan Pendidikan ini menjadi acuan dalam melakukan dukungan pembiayaan pendidikan. Model pembiayaan pendidikan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kerjasama yang sudah dibangun secara berkelanjutan. Melalui model pembiayaan dari pemerintah desa dan komite sekolah diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pihak-pihak terkait maupun pihak-pihak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga ikut terlibat dalam memberikan dukungannya.

Yogyakarta, 04 September 2023

Penulis

Daftar isi

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar isi	3
A. Konseptualisasi	4
B. Model	4
1. Pemerintah Desa.....	5
2. Komite sekolah.....	6
C. Ringkasan	6
Daftar Pustaka	7

A. KONSEPTUALISASI

Biaya pendidikan ialah bagian utama dalam sebuah proses penyelenggaraan pendidikan atau bisa kita sebut sebagai instrumen kunci dalam penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Biaya bukan hanya dalam bentuk uang tetapi memiliki lingkup yang begitu luas karena biaya juga meliputi barang dan tenaga yang ada dalam lembaga pendidikan (Supriyadi, 2003). Biaya pendidikan ialah keseluruhan biaya yang dihasilkan serta dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi gaji guru, pengadaan alat-alat dan bahan pelajaran, alat tulis kantor (ATK), perawatan sarana dan prasarana, ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, serta supervisi pendidikan (Fattah, 2009).

Otonomi daerah, kehadirannya berdampak kepada pengelolaan pendidikan. Setiap wilayah daerah memiliki kemampuan dalam memekarkan pendidikan di daerahnya berdasar dengan kemampuan dan tuntutan masyarakatnya karena pada kenyataannya output lembaga pendidikan harus dikembalikan kepada masyarakat yang juga berpengaruh terhadap tata kelola pendidikan (Roji, 2010). Namun tidak dapat sangkal bahwa adanya desentralisasi pendidikan justru melahirkan polemik baru khususnya dalam persoalan pengelolaan pembiayaan pendidikan, permasalahan ini hadir dikarenakan gagasan konsep pembiayaan khusus pendidikan yang masih belum tertata secara sistematis (Sumpena et al., 2022).

Upaya peningkatan mutu sekolah perlu adanya dukungan oleh berbagai unsur eksternal masyarakat dalam bentuk komite sekolah yang bertugas membantu dukungan finansial bersama. Kepala sekolah perlu membangun networking bersama pemerintah desa, sedangkan guru maupun komponen sekolah lainnya perlu membangun animo masyarakat dalam menyikapi problematika pembiayaan pendidikan, sehingga dapat terbentuk kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih sesuai dan berkeadilan serta bertujuan untuk mencapai tujuan Pendidikan

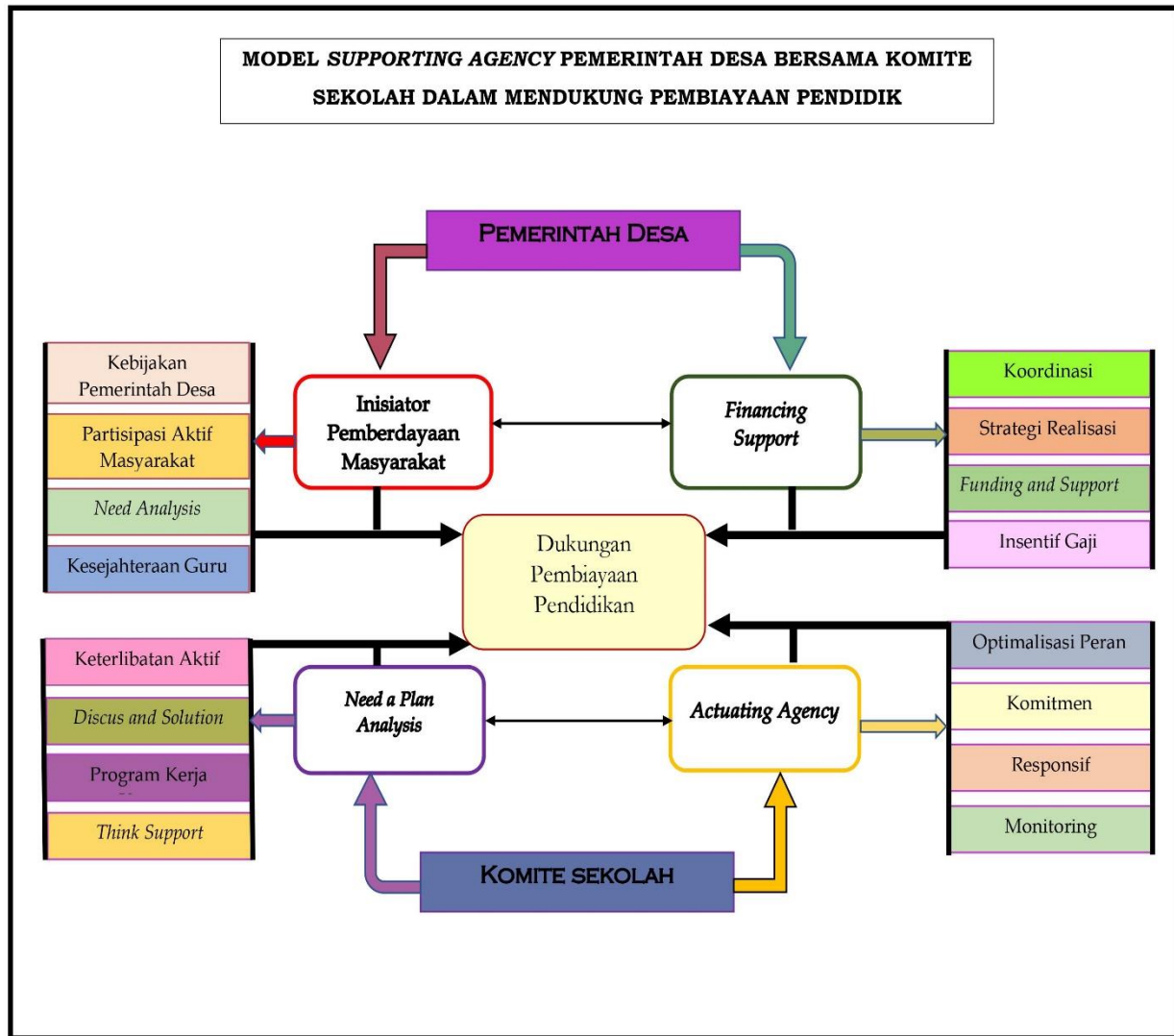
Pembiayaan menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan operasional di lembaga pendidikan. Sehingga pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan memiliki peran besar untuk menjadi badan pendukung dalam pembiayaan pendidikan. Seperti halnya kehadiran pemerintah desa selaku pemerintah setempat yang bertanggungjawab atas pembangunan dan pemeliharaan masyarakat, kemudian komite sekolah yang merukapan perwakilan dari orang tua dan masyarakat untuk terlibat dalam peningkatan mutu Pendidikan. Keterlibatan masyarakat dibidang pendidikan begitu dibutuhkan dan diharapkan bukan hanya dalam bentuk pengungkapan konsep dan sekedar wacana, melainkan lebih pada tindakan nyata di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi model peran pemerintah desa dan komite sekolah dalam mendukung pembiayaan pendidikan Di SDN. 182 Kab. Halmahera Selatan.

B. MODEL

Model adalah gambaran sederhana tentang suatu konsep, objek, atau fenomena yang terjadi di alam. Model mencakup data tentang suatu fenomena yang dibuat dengan maksud untuk meneliti fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat berupa salinan, deskripsi suatu entitas nyata, sistem, atau peristiwa yang hanya fakta-fakta yang dianggap cukup signifikan untuk dipelajari (Achamd, 2008).

Gambarkan model dari hasil analisis atlas:



Deskripsi:

1. Pemerintah Desa

- **Inisiator pemberdayaan masyarakat**

- 1) Kebijakan pemerintah desa: Pemerintah desa berperan dalam membuat kebijakan
- 2) Partisipasi aktif masyarakat: Masyarakat ikut aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah desa
- 3) Need analysis: Pemerintah desa menganalisis kebutuhan Pendidikan di Desa
- 4) Kesejahteraan guru: Kesejahteraan guru menjadi program kebijakan Pemerintah desa

- **Financing Support**

- 1) Koordinasi: Pemerintah desa melakukan koordinasi dengan pihak sekolah
- 2) Strategi realisasi: Menyusun strategi untuk merealisasikan program dukungan pembiayaan pendidikan

- 3) Funding and support: Selanjutnya dukungan pemerintah desa melalui pembiayaan diberikan kepada guru.
- 4) Insentif gaji: Dukungan pembiayaan ini diberikan dalam bentuk insentif gaji sebagai upaya dalam memberikan dukungan kesejahteraan kepada guru

2. Komite sekolah

▪ *Need a plan analysis*

- 1) Keterlibatan aktif: Komite sekolah aktif menjalankan tugas serta fungsinya
- 2) Discuss and solution: Berdiskusi dan melahirkan solusi sebagai alternatif pemecahan masalah khususnya permasalahan pembiayaan pendidikan
- 3) Program kerja: Menyusun program pembiayaan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang
- 4) Think support: Memberikan dukungan pemikiran dalam mencari sumber pembiayaan untuk pendidikan

▪ *Agen penggerak*

- 1) Optimalisasi peran: Peran komite sekolah harus berjalan optimal sehingga tercapainya realisasi program pembiayaan
- 2) Komitmen: Fokus pada satu tujuan yaitu dukungan pembiayaan pendidikan
- 3) Responsif: Komite sekolah harus cepat mengambil tindakan, menanggapi persoalan dalam hal pembiayaan pendidikan
- 4) Monitoring: Selanjutnya komite sekolah memantau setiap bentuk realisasi anggaran dan memastikan pelaksanaan program sesuai perencanaan.

C. RINGKASAN

Kesimpulannya adalah model pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu sebagai inisiator pemberdayaan masyarakat dan *financing support*. Hal ini menjadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan dukungan pembiayaan, dukungan ini berupa pemberian insentif kepada guru. Kebijakan ini juga lahir atas dasar kepedulian dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa selaku pemerintah yang berwenang dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa berinisiatif membentuk kebijakan dengan melibatkan diri dalam pemenuhan kebutuhan Pendidikan yaitu kesejahteraan dan ketersediaan guru. Kemudian komite sekolah yaitu *need a plan analysis* dan agen penggerak. Komite sekolah memberikan dukungan pemikiran sebagai inisiatif komite sekolah untuk meningkatkan standar pendidikan meliputi keterlibatan komite dalam merumuskan keputusan dan kebijakan tentang program sekolah. Sebagai agen penggerak optimalisasi peran komite sekolah perlu dilakukan sehingga tercapainya realisasi program pembiayaan.

Pemerintah desa harus konsisten dengan dukungan pembiayaan pendidikan yang diberikan sehingga memiliki dampak pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Komite sekolah harus berkontribusi penuh agar tercapainya mutu pendidikan, kemudian membangun mitra dengan pihak eksternal agar terjalin kerja sama dan berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan khususnya dukungan pembiayaan.

Kebijakan pemerintah desa merupakan langkah alternatif yang dapat menawarkan solusi atas permasalahan pendidikan, termasuk yang menyangkut kesejahteraan guru. Respon dan partisipasi aktif

masyarakat juga menjadi hal penting dalam mendukung gagasan kebijakan pemerintah desa untuk mendukung pembiayaan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achamd, M. (2008). *Tehnik Simulasi dan Permodelan*. Yogyakarta.
- Fattah, N. (2009). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan* (Edisi 1). Remaja Rosdakarya.
- Roji, M. (2010). Problematika Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah di Indonesia. *Demokrasi*, 09(01), 1–16. [http://eprints.umsida.ac.id/6498/1/Problematika Pembiayaan pendidikan %28Rojii%29.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/6498/1/Problematika_Pembiayaan_pendidikan_%28Rojii%29.pdf)
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Supriyadi, A. (2003). *Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah* (Vol. 67, Issue 10). Al-Mawarid Edisi X. <https://media.neliti.com/media/publications/25994-EN-sistem-pembiayaan-berdasarkan-prinsip-syariah-suatu-tinjauan-yuridis-terhadap-pr.pdf>